

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN  
AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA APARAT  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**(Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**Nama : SAHITA NUR WIDIANI**  
**NPM : 1751030124**  
**Program Studi : Akuntansi Syariah**



**PRODI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN  
AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA APARAT  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**Nama : SAHITA NUR WIDIANI  
NPM : 1751030124  
Program Studi : Akuntansi Syariah**

**Pembimbing I : Any Eliza, M. Ak.**

**Pembimbing II: Rosydalena Putri, M.S.Ak, Akt.**

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik merupakan unsur penting dalam sebuah laporan keuangan yang baik. Penyusunan anggaran dilakukan untuk membuat rencana anggaran biaya setiap kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan keterbukaan dari aparat pemerintah. Keterbukaan harus diwujudkan dengan laporan keuangan yang akuntabel. Pandangan hukum islam terhadap laporan keuangan yang akuntabel mengupayakan pemeliharaan amanah yang telah diamanahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada desa-desa di kecamatan Abung Surakarta. Baik secara parsial maupun simultan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada pada desa di Pemerintahan Daerah Kecamatan Abung Surakarta, yaitu sebanyak 9 Kantor Dinas. Sampel penelitian ini adalah seluruh aparat yang menduduki jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, dan Kasi yang terlibat dalam partisipasi penyusunan anggaran. Total sampel yang akan diteliti pada penelitian ini berjumlah 72 orang. Dengan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan tingkat signifikan 0,004 dan 0,024. Dan secara bersama-sama (simultan) akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan tingkat signifikan 0,002.

**Kata Kunci** : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

## **ABSTRACT**

*Participation in budgeting and public accountability is an important element in a good financial report. Budgeting is done to make a budget plan for each activity. In carrying out activities, transparency from government officials is required. Disclosure must be realized with accountable financial reports. The view of Islamic law on accountable financial reports seeks to maintain the mandate that has been entrusted. This study aims to find out empirically whether participation in budgeting and public accountability has a significant effect on the performance of local government officials in villages in the Abung Surakarta sub-district. Either partially or simultaneously.*

*The type of research in this research is descriptive research with a quantitative approach. The population in this research is all Regional Work Units (SKPD) located in the village in the Regional Government of Abung Surakarta District, namely as many as 9 Service Offices. The sample of this research is all officials holding the positions of Village Head, Village Secretary, Kaur, and Kasi who are involved in participating in budget preparation. The total sample to be examined in this study is 72 people. By using purposive sampling based on predetermined criteria, using multiple linear regression data analysis techniques.*

*The results of this study indicate that the variables of participation in budgeting and public accountability have a significant effect on the performance of local government officials. With a significant level of 0.004 and 0.024. And together (simultaneously) will improve the performance of local government officials. With a significant level of 0.002.*

**Keywords:** *Participation in Budgeting, Public Accountability, and Performance of Local Government Officials*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmeh Sukarame Bandar Lampung 35131  
telp (0771) 704030

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahita Nur Widiani  
NPM : 1751030124  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Bandar Lampung, 31 Mei 2023**  
**Peneliti,**

**Sahita Nur Widiani**  
**NPM. 1751030124**



KEMENTERIAN AGAMA  
LIJN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmerti Sukarame  
Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

## PERSETUJUAN

Judul : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Sahita Nur Widiani  
NPM : 1751030124  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Any Eliza, M. Ak.

NIP. 198308152006042004

Rosydalina Putri, M.S.Ak., Akt.

NIP. 198710182018012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zulfiansyah, M.M.

NIP. 1983022209121003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmien Sukarame  
Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)" disusun oleh **Sahita Nur Widiani, NPM : 1751030124**, Program Studi : Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Rabu, 07 Juni 2023

### TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ridwansyah, M.E.Sy**

Sekretaris : **Andika Saputra, M.M**

Penguji I : **Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**

Penguji II : **Any Eliza, S.E., M.Ak**

Penguji III : **Rosydalina Putri, M.S.Ak., Akt**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Dr. Fuji Suratmien, S.E., M.M., Akt., CA.**

089262008011008

## MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

**(Q.S Al-Ahzab : 72)**

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي  
عَلَيْهِ فِيهَا

"Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakan tugas dengan baik."

**(HR. Muslim)**



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Saya persembahkan sebuah karya tulis ini sebagai salah satu wujud dari rasa cinta dan kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sahidi dan Ibunda tercinta Juwita Sari, yang selalu mengasihi, menyayangi dengan penuh ketulusan, selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat dan baik. Guru terbaikku sepanjang masa, terimakasih atas cinta kasih yang engkau wujudkan dalam pengorbananmu selama ini. Semoga karya ini, dapat menjadi sebab tangis harumu atas pencapaian anakmu.
2. Suamiku tersayang, Wan Danil, S.Pd, yang telah mendoakan, memberikan semangat, serta motivasi untuk menemani disetiap langkah perjuangan istrimu.
3. Adikku tercinta Ditama Nurdin, terima kasih atas do'a, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
4. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Sahita Nur Widiani, dilahirkan di Bumi Dipasena Agung pada tanggal 11 Juni 1999, anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Sahidi dan Ibu Juwita Sari.

Jenjang pendidikan formal dan non formal yang pernah penulis tempuh adalah:

1. TK Xaverius Bumi Dipasena Agung, lulus pada tahun 2005.
2. SD Negeri 01 Bumi Dipasena Agung, lulus pada tahun 2011.
3. SMP Negeri 02 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus pada tahun 2014.
4. SMA Negeri 01 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus pada tahun 2017.
5. Pada Tahun 2017 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ma'had Al Jamiah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017
7. Pondok Pesantren An Noor Sukarame, Bandar Lampung pada tahun 2018

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara)** sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Bapak A. Zuliansyah, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Any Eliza, M.Ak. selaku pembimbing akademik I yang telah banyak memberikan arahan terbaiknya dan dengan siap membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Rosydalina Putri, M.S.Ak, Akt. selaku pembimbing akademik II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah, dan menjadi ilmu yang barakah.
6. Bapak Apriyadi, S.IP., M.AP selaku Kepala Camat Kecamatan Abung Surakarta, dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren An Noor yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan serta ridho kepada saya, khususnya Mbah Nyai

Siti Fatimah, Yai Dr. Ruslan Abdul Ghofur Noor M.Si, Nyai Ervina Ashanti.

8. Kepada keluargaku tercinta, Ayahanda Sahidi dan Ibunda Juwita Sari, serta adikku Ditama Nurdin, yang telah memberikan motivasi serta membangun mental penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Kepada suamiku, Wan Danil, S.Pd. terimakasih telah mendukung dan membantu dalam setiap kesulitan dalam proses penyusunan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman perkuliahanku, terkhusus nya Rozalia Fitriana, Feby Oktariza Halida, Jari Eka Susanti yang telah ikut membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Keluarga besar AMPIBI (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi) yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga besar Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU UIN Raden Intan Lampung yang telah mbersamai.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

**Bandar Lampung, Mei 2023**  
**Penulis,**

**Sahita Nur Widiani**  
**NPM. 175103012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	17
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	25
B. Teori Stewardship.....	27
C. Teori Kontijensi .....	28
D. Partisipasi Penyusunan Anggaran.....	29
E. Akuntabilitas Publik.....	31
F. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.....	33
G. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam .....	35
H. Hipotesis .....	37
I. Kerangka Pemikiran.....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	41
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Definisi Operasional Variabel .....	50
G. Metode Analisis Data .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
C. Hasil Analisis Data dan Uji Kualitas Data.....	64
D. Pembahasan Penelitian .....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggaran Dana Desa di Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2019.....	10
Tabel 3.1 Nama-nama Desa di Kecamatan Abung Surakarta .....	43
Tabel 3.2 Poin Skala Likert .....	50
Tabel 3.3 Operasional Variabel .....	51
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2020.....	60
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Abung Surakarta Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2020.....	61
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden.....	62
Tabel 4.4 Usia Responden.....	62
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Responden .....	63
Tabel 4.6 Status Jabatan Responden.....	64
Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas .....	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas .....	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas .....	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas .....	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	72
Tabel 4.13 Hasil Uji t Hitung .....	73
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (F) .....	75
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Berganda .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran .....	40
Gambar 4.1 : Grafik Normal P-P Plot.....	69
Gambar 4.1 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	71



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penulis perlu memaparkan beberapa arti dari kata yang menjadi judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalah fahaman. Judul dari penelitian yang dilakukan yaitu **PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**.

Kata kunci dari judul penelitian diatas yaitu :

### 1. Pengaruh

Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu variabel independent ( $X_1$  : Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan  $X_2$  : Akuntabilitas Publik) dan variabel dependent ( $Y$  : Kinerja Aparat Pemerintah Daerah)

### 2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Keterlibatan seseorang yang bersifat mental dan emosi serta fisik,<sup>2</sup> dalam memberikan respon terhadap proses perencanaan penyusunan anggaran yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan serta bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

### 3. Akuntabilitas Publik

Bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang pimpinan, pejabat, atau pelaksana ataupun sesuatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun kewenangan untuk meminta

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

<sup>2</sup> Wikipedia, “Partisipasi”, [Id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi), diakses pada 25 Desember 2020

penjelasan terkait kinerja ataupun tindakan dalam menjalankan misi serta tujuan organisasi dalam wujud pelaporan yang sudah ditetapkan secara periodik.<sup>3</sup>

#### 4. Kinerja

Usaha secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh individu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>4</sup> Kinerja manajerial yang diperoleh dari upaya manajer merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan organisasi secara efektif.

#### 5. Aparat Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

#### 6. Perspektif Islam

Cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas berdasarkan aturan agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>6</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya aparat pemerintah Desa Purbasakti dalam mengefektifkan penyusunan anggaran dan

---

<sup>3</sup> Muchlisin Riadi, "Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi, dan Jenis-Jenis)" Kajian Pustaka, Januari 09, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsip-dimensi-dan-jenis.html>, diakses pada 25 Desember 2020

<sup>4</sup> Mangkunegara, "*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hal 67

<sup>5</sup> Yunas, "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah", Surakarta, 5 Februari 2016

<sup>6</sup> Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pusaka Seti, 2013), hal. 249

akuntabilitas publik dalam merealisasikan penggunaan Dana Desa dan bagaimana pandangan dalam Islam.

## **B. Latar Belakang**

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>8</sup>

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintahan pusat maupun

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah BAB I, pasal 1 ayat 43, h 7, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa BAB I, pasal 1 ayat 1*

<sup>8</sup> Nurhayati, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*, VOL 1 No 1, Oktober 2019

pemerintahan daerah saja namun lebih menjangkau hingga wilayah pedesaan.<sup>9</sup>

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.<sup>10</sup> Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Maria Rosa Ratna Sari Angraini, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul* Jogjakarta(Modus), 2016, Volume 28, hal. 155

<sup>10</sup> *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*, Jakarta, 2015, hal. 48

<sup>11</sup> Nuryuliana, "Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan" (Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal 5

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting yang melibatkan berbagai pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dimana masing-masing pihak memainkan peran dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dan tujuan anggaran. Anggaran yang dihasilkan senantiasa digunakan sebagai tolak ukur bagi kinerja manajer dan para karyawan. Oleh karenanya, penyusunan anggaran partisipatif diharapkan akan meningkatkan kinerja para manajer, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggungjawab untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut.<sup>12</sup>

Pada sektor pemerintahan sebuah anggaran terkait dengan proses penentuan besaran alokasi dana di setiap program dan aktivitas. Dana yang digunakan dalam setiap aktivitas kegiatan tersebut merupakan dana milik rakyat. Terdapat perbedaan dalam hal anggaran yakni anggaran sector public dan anggaran sector swasta. Pada anggaran sector publik anggaran yang telah disusun dan dipublikasikan kepada rakyat, dimana anggaran dari sector public berasal dari pajak, retribusi, laba perusahaan milik daerah atau Negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi. Sedangkan dalam sector swasta anggaran yang telah disusun tidak akan dipublikasikan kepada rakyat karena anggaran tersebut bersifat rahasia. Dana anggaran dari sector swasta berasal dari modal sendiri, laba di tahan, aktiva, dan pembiayaan eksternal yang meliputi, utang bank, obligasi, penerbitan saham.

Akuntabilitas publik merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara terang-terangan diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat merasa ikut

---

<sup>12</sup> Lilis Setyowati, Purwantoro, "Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dan Kepuasan Kerja Pada Pemerintahan Kota Semarang", *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*, Vol 21 No. 2, hal 66-67

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program pemerintah. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Memastikan tujuan dari pemerintahan tersebut terwujud serta ikut dalam menjalankan tujuan agar terciptanya masyarakat yang dinamis dan sejahtera.<sup>13</sup>

Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran. Sesuai permendagri No 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa<sup>14</sup> yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Konsep akuntabilitas dalam Islam diartikan sebagai kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengolah sumber daya publik dan dapat mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah sehingga manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

---

<sup>13</sup> Roni Prandara, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat, Studi kasus Desa Waringin Barat*, Lampung, 2020, hal. 4-5

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 37 Tahun 2007, tentang pengelolaan keuangan desa, Bab I, Pasal 1, ayat 2.

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>15</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan, bahwa amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki setiap umat dan bagi yang menerima amanat harus menjaga amanah yang diberikan. Dalam praktek akuntansi, amanah di interpretasikan sebagai akuntabilitas, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Tuhan, dimana segala tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pengungkapan tersebut dilakukan pertama yaitu untuk Allah SWT dan yang kedua kepada masyarakat. Hal tersebut karena, akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana kesejahteraan umat juga menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan.<sup>16</sup>

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya terhadap masyarakat. Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas suatu organisasi. Agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai secara efektif maka perlu memperhatikan hubungan yang berkaitan dengan anggaran. Dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah, memiliki keterlibatan yang tidak dapat dipisahkan dari sikap terhadap situasi kerja dan perilaku individu khususnya manajer yang dapat dilihat melalui sikap dan tanggungjawab dalam organisasi. Pada sektor publik, kinerja pemerintah belum memiliki sistem pengelolaan keuangan atau

---

<sup>15</sup> Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, Diponegoro, 2005), Q.S An – Nisa : 58

<sup>16</sup> Ahmad Syafiq, *Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat ZISWAF* Volume 3. No. 1 juni 2016, hal. 27

penganggaran partisipatif yang baik. Mulai dari proses perencanaan, dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan APBD, pertanggung jawaban berupa laporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan. Apabila proses penganggaran pemerintah daerah selalu terlambat dalam pengesahan APBD, akan menyebabkan program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan, sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah.<sup>17</sup>

Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Dengan adanya penilaian kinerja aparat pemerintah daerah, akan menampakkan sejauhmana aparat pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana program kerja.

Pencapaian target kinerja APBD yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2009, dimana program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan umum. Pemerintah Desa di Kecamatan Abung Surakarta merupakan entitas yang memiliki tanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>17</sup> Ernawilis.2015. *Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi Kabupaten Kuantang Singing*. Jom fekom, 2(2), hal 14.

<sup>18</sup> Sarjito, Bambang dan Osmad Muthaher. 2007. “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*”. SMA X Makassar.



berlaku. Namun, fenomena atau permasalahan utama yang terjadi di lapangan terkait masalah partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas pemerintah desa secara umum pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara adalah mengenai kemampuan manajerial aparat pemerintah desa, khususnya dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang masih minim, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara masih rendah, selain itu masih adanya kesimpangsiuran informasi dan aturan mengenai penggunaan anggaran, terjadinya tumpang tindih aturan dari berbagai pihak yang mempunyai kewenangan terkait aturan pengelolaan keuangan desa. Disisi lain juga mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat Desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara tidak mengetahui arti penting dari akuntabilitas keuangan desa. Masyarakat tidak mengetahui dana tersebut digunakan dan dibelanjakan karena tidak ada kontribusi dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa juga belum sepenuhnya maksimal.<sup>19</sup>

Sedangkan seharusnya masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dana desa sebagai warga negara yang patuh terhadap pajak. Masyarakat Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara meminta aparat pemerintah desa untuk memberikan keterbukaan atas informasi keuangan desa melalui *website* agar informasi keuangan desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat mengetahui realisasi anggaran dana desa.

---

<sup>19</sup> Wawancara camat Kecamatan Abung Surakarta Bapak Apriyadi, S.I.P., M.AP pada 10 Desember 2020

**Tabel 1.1**  
**Data Anggaran Dana Desa di Kecamatan Abung Surakarta**  
**Tahun 2019**

No.	Nama Desa	Penyusunan Anggaran	Realisasi	%
1.	Bandar Abung	Rp 686.033.254	Rp 584.069.649	85,14
2.	Bandar Sakti	Rp 669.772.683	Rp 433.971.192	64,79
3.	Bangun Sari	Rp 487.158.878	Rp 356.063.085	73,09
4.	Bumi Raharja	Rp 618.689.532	Rp 416.759.299	67,36
5.	Bumi Restu	Rp 617.395.389	Rp 527.994.079	85,52
6.	Karya Sakti	Rp 673.308.455	Rp 566.098.607	84,08
7.	Purba Sakti	Rp 641.977.185	Rp 590.995.702	92,06
8.	Sukoharjo	Rp 573.137.197	Rp 457.323.932	79,79
9.	Tatakarya	Rp 742.847.634	Rp 610.452.809	82,18

Sumber : SK Peraturan Bupati Tentang ADD Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Anggaran Dana Desa di Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2019 menunjukkan bahwa anggaran dana desa Bandar Abung dianggarkan Rp 686.033.254 dan terealisasi Rp 584.069.649 dengan persentase 85,14%, anggaran dana desa Bandar Sakti dianggarkan Rp 669.772.683 dan terealisasi Rp 433.971.192 dengan persentase 64,79%, anggaran dana desa Bangun Sari dianggarkan Rp 487.158.878 dan terealisasi Rp 356.063.085 dengan persentase 73,09%, anggaran dana desa Bumi Raharja dianggarkan Rp 618.689.532 dan terealisasi Rp 416.759.299 dengan persentase 67,36%, anggaran dana desa Bumi Restu dianggarkan Rp 617.395.389 dan terealisasi Rp 527.994.079 dengan persentase 85,52%, anggaran dana desa Karya Sakti dianggarkan Rp 673.308.455 dan terealisasi Rp 566.098.607 dengan persentase 84,08%, anggaran dana desa Purba Sakti dianggarkan Rp 641.977.185 dan terealisasi Rp 590.995.702 dengan persentase 92,06%, anggaran dana desa Sukoharjo dianggarkan Rp

573.137.197 dan terealisasi Rp 457.323.932 dengan persentase 79,79%, anggaran dana desa Tatakarya dianggarkan Rp 742.847.634 dan terealisasi Rp 610.452.809 dengan persentase 82,18%.

Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Perencanaan dana desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Banyaknya peraturan dalam Dana Desa membuat pengelolaannya sangat rumit, ini menjadikan banyak aparat desa yang kemudian enggan atau takut untuk membuat keputusan dan hanya menjadi pelaksana proyek yang dari atas. Padahal belum tentu proyek tersebut sesuai dengan potensi desa dan juga aspirasi masyarakatnya. Lalu banyak dari pendampingan desa yang dilakukan sebagai bagian dari Dana Desa yang hanya mengutamakan pencarian data untuk laporan dan pelaksanaan proyek, dibandingkan dengan edukasi dan mengorganisir desa tersebut. Implikasinya sangat mungkin terjadi bentrokan antara kepentingan masyarakat dengan regulasi dan prioritas dari atas.

Dalam penelitian yang dilakukan Solikhun Arifin,<sup>20</sup> yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi” menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat, dengan turut serta para pegawai dalam proses penyusunan anggaran, maka mereka juga merasa bertanggung jawab atas keberhasilan program yang sebelumnya telah dibahas bersama tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat faktor-faktor situasional yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat yaitu komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan. Tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan

---

<sup>20</sup> Solikhun Arifin, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi*”, Semarang.2012

menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya, sehingga tiap-tiap individu akan selalu meningkatkan kinerjanya karena mereka akan selalu berusaha agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian juga dengan faktor gaya kepemimpinan, penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan yang dilandasi rasa saling percaya, kekeluargaan, menghargai gagasan bawahan dan adanya komunikasi yang terbuka (*consideration*) secara signifikan dapat meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah.

Selain hasil penelitian Solikhun Arifin, hasil penelitian yang serupa dinyatakan oleh Rosydalina Putri<sup>21</sup>, dan Umillah Riswaraji Julyarsyah<sup>22</sup> yang menyatakan bahwa dari penelitian yang pernah dilakukan terdapat hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra Sinuraya.<sup>23</sup> Dan hasil penelitian serupa oleh Ietje Nazaruddin dan Henry Setyawan,<sup>24</sup> yang menyatakan bahwa antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan.

Hubungan positif dan negatif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dipengaruhi oleh kondisi dan

---

<sup>21</sup> Rosydalina Putri, “*Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Bank Syariah*”, Jurnal Fidusia Vol 4, No. 1, April 2021

<sup>22</sup> Umillah Riswaraji Julyarsyah, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Motivasi, Dan Job Relevant Information Sebagai Variable Moderasi*”, (Jakarta. 2020)

<sup>23</sup> Candra Sinuraya, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajer: Peran Kecukupan Anggaran dan Job-Relevant Information sebagai Variabel Intervening*”, Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 Mei 2009

<sup>24</sup> Ietje Nazaruddin dan Henry Setyawan, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan Job Relevant Information sebagai Variabel Moderasi*”, Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2, Juli 2012

situasi tertentu. Kondisi dan situasi seperti ini dijelaskan melalui pendekatan kontingensi (*contingency approach*), pendekatan ini memberikan gagasan bahwa sifat hubungan yang ada dalam partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial harus sesuai dengan aspek-aspek organisasi dan berbeda di setiap situasi. Pendekatan kontingensi mempelajari perilaku manajerial sebagai reaksi atas sejumlah keadaan tertentu guna menyarankan praktek-praktek manajemen yang dianggap paling cocok dalam rangka usaha menghadapi situasi tertentu.<sup>25</sup>

Dalam penyusunan anggaran terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan *top-down*, pendekatan *bottom up*, dan pendekatan partisipasi. Proses penyusunan anggaran dengan metode pendekatan *top-down* adalah penganggaran yang ditetapkan dan disahkan oleh pihak manajemen atasan, sedangkan pihak manajemen bawah harus melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Pendekatan yang kedua yakni metode pendekatan *bottom up*, dimana penyusunan anggaran diberikan kepada pihak manajemen level bawah, untuk kemudian diajukan kepada pihak manajemen level atas. Pendekatan yang terakhir, merupakan pendekatan yang sangat efektif yakni metode pendekatan partisipasi, dimana interaksi antara manajemen level atas dan manajemen level bawah dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas secara parsial penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, maka penulis perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara)”**.

---

<sup>25</sup> Gita Pramudya Saraswati, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating*”, (Yogyakarta.2015), hal 4

### **C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kemampuan manajerial aparat pemerintah desa, khususnya dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang masih minim.
2. Adanya kesimpangsiuran informasi dan aturan mengenai penggunaan anggaran.
3. Terjadinya tumpang tindih aturan dari berbagai pihak yang mempunyai kewenangan terkait aturan pengelolaan keuangan desa.
4. Masyarakat Desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara tidak mengetahui arti penting dari akuntabilitas keuangan desa. Masyarakat tidak mengetahui dana tersebut digunakan dan dibelanjakan karena tidak ada kontribusi dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa juga belum sepenuhnya maksimal.<sup>26</sup>

Berdasarkan identifikasi diatas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, tidak melibatkan Kecamatan lain.
2. Penelitian ini meneliti hubungan antara kinerja aparat pemerintah daerah terhadap partisipasi aparatur pemerintah desa dalam penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
3. Penelitian ini menitik beratkan bagaimana penerapan akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa yang berfokus kepada penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang sudah disebutkan diatas, penulis merasa tertarik lebih jauh tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan

---

<sup>26</sup> Wawancara camat Kecamatan Abung Surakarta Bapak Apriyadi, S.I.P., M.AP pada 10 Desember 2020

Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Desa-desi di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara).

Partisipasi pada proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting, karena keberhasilan pemerintah dinilai dari kinerja aparat yang ada pada pemerintah tersebut. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran ( $X_1$ ) dan akuntabilitas publik ( $X_2$ ) yang merupakan variabel independen ( $X$ ) terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ( $Y$ ) yang merupakan variabel dependen. Oleh karena itu dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?
3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam perspektif Islam pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik secara simultan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam perspektif Islam pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap skripsi ini bermanfaat untuk penulis sendiri maupun berbagai pihak, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama dibangku kuliah dengan kondisi yang sesuai pada lapangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, serta kinerja aparat pemerintah daerah.

##### 2. Manfaat Praktisi

###### a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola pikir yang dinamis kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

###### b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan kepada para aparatur perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi



daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada aparat pemerintah desa di Kecamatan Abung Surakarta dalam pencatatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan laporan keuangan yang akuntabel.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini dapat jadi acuan untuk masyarakat Desa di Kecamatan Abung Surakarta agar masyarakat mengetahui arti penting dari akuntabilitas keuangan desa. Dan Masyarakat mengetahui dana tersebut dialokasikan untuk apa dengan ada nya partisipasi dalam penyusunan anggaran pada Desa di Kecamatan Abung Surakarta, proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa.

d. Bagi Perkembangan Akuntansi Syariah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat berkontribusi dalam perluasan materi ajar dalam akuntansi syariah, dapat berkembang dalam ranah akuntansi dalam pemerintahan, sehingga dalam pemerintahan dapat diisi oleh para akuntan syariah agar terciptanya pengelolaan uang negara yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Peneliti terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan kemudian selanjutnya menemukan inspirasi untuk penelitian yang selanjutnya. Selain itu, peneliti terdahulu membantu untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan, kemudian hasil penelitian untuk membandingkan antara peneliti yang sudah dilakukan. Dengan melakukan hal ini, dapat melihat orisinalitas penelitian yang akan dilakukan kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini, antara lain :

1. Rosydalina Putri, terbitan Jurnal Fidusia Vol 4, No. 1, April 2021. Dengan judul “Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Bank Syariah”. Jenis penelitian ini

adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data yang didapat kemudian diolah menggunakan software smartPLS Versi 3. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi kerja sama-sama memiliki pengaruh dalam menentukan kinerja manajerial pada perbankan Syariah di Bandar Lampung. Hasil uji pada koefisien parameter antara partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial terdapat pengaruh positif dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,981 dan tingkat signifikan pada 0,05. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa semakin terlibat seorang karyawan atau pegawai dalam proses penyusunan anggaran maka akan semakin memberikan dampak yang baik terhadap kinerja manajerial pada individu tersebut dengan didasarkan adanya rasa tanggung jawab atas keterlibatannya. Hasil pengujian selanjutnya yakni koefisien parameter antara motivasi terhadap kinerja manajerial juga memiliki pengaruh positif dengan nilai *t-statistic* sebesar 22,051 dengan tingkat signifikan 0,05. . Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa apabila seorang pegawai atau karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi maka akan semakin baik pula kinerja manajerial dari individu tersebut. Pada kasus di Bank Umum Syariah yang berada di Bandar Lampung motivasi kinerja tersebut didasarkan pada adanya pemberian reward dalam pencapaian target sehingga mampu meningkatkan kinerja.<sup>27</sup>

2. Restu Agusti, terbitan Jurnal Ekonomi Volume 20, Nomor 3, 2020. Dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)”. Penelitian ini menerapkan metode survei yang dilaksanakan dengan pertanyaan tertulis. Penelitian ini hanya mengambil variabel desentralisasi dan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi sehingga hanya membatasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada dua variabel pemoderasi. Hasil penelitian

---

<sup>27</sup> Rosydalina Putri, “Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Bank Syariah”, Jurnal Fidusia Vol 4, No. 1, April 2021

ini menunjukkan bahwa: (1) Variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda. Pengujian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran dan meningkatkan kinerja aparat pemda. (2) Variabel desentralisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. (3) Tingkat partisipasi penyusunan anggaran akan mempunyai pengaruh negative terhadap kinerja aparat pemda pada budaya organisasi yang tinggi, dan akan berpengaruh positif pada budaya organisasi yang rendah.<sup>28</sup>

3. Eka Budi Setyaningtyas, terbitan Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 9 (1) 2019, 29 - 39. Dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Desentralisasi sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini menggunakan data primer. Sumber data yang diperoleh secara langsung yang secara khusus dikumpulkan dengan menjawab pertanyaan peneliti. Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap, yakni pengujian kualitas data, melakukan pengujian asumsi klasik, dilanjutkan analisis regresi sederhana dan berganda, dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS diperoleh t hitungnya adalah sebesar t hitung  $3.574 > t$  tabel  $1.690$  maka  $H_1$  diterima. (2) Komitmen organisasi memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dapat dilihat nilai t hitungnya sebesar t hitung  $2.945 < t$  tabel  $1.690$  maka  $H_2$  diterima. (3) Budaya organisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dapat dilihat t hitung t hitung -

---

<sup>28</sup> Restu Agusti, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)”, Jurnal Ekonomi Volume 20, Nomor 3, 2020

0,652 < t tabel 1.690 maka H3 ditolak. (4) Desentralisasi tidak memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dapat dilihat nilai t hitungnya sebesar t hitung 0.841 < t tabel 1.690 maka H4 ditolak.<sup>29</sup>

4. Sri Mauliza, Widia Astuti, Irfan, terbitan Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 8, No. 1, 2022. Dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, dan Kejelasan Sasaran Anggaran, Terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Partial Least Square (PLS). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan jumlah pegawai 31 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha1 diterima), (2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha2 diterima), dan (3) Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Ha3 diterima). (4) Komitmen Organisasi Memoderasi Partisipasi Anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial (Ha4 diterima). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.<sup>30</sup>
5. Esha Dening Shandi, Handoko A Hasthoro, Wika H Putri, terbitan Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 1, Maret 2016. Dengan judul “Kinerja

---

<sup>29</sup> Eka Budi Setyaningtyas, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Desentralisasi sebagai Variabel Moderasi”, Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 9 (1) 2019, 29 - 39

<sup>30</sup> Sri Mauliza, Widia Astuti, Irfan, “Pengaruh Partisipasi Anggaran, dan Kejelasan Sasaran Anggaran, Terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 8, No. 1, 2022.

Manajerial Pemerintah Dalam Perspektif Islam (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)”. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Penelitian menunjukkan hasil bahwa budaya kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sementara partisipasi anggaran, job relevant information, kepuasan kerja dan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial.<sup>31</sup>

6. M. Fadhil Junery, S.El.,M.E,Sy dan Norhanisah, S.Akun terbitan JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol. 2, No. 1, Juni 2018. Dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga sumber lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa uji regresi menyatakan terjadi hubungan positif antara pengaruh anggaran berbasis kinerja (X) terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah (Y), sedangkan hasil uji t menyatakan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t table dengan signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya variabel anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap peningkatan kinerja (Y) dengan persentase sumbangan pengaruh variabel independen (anggaran berbasis kinerja) sebesar 16,6%. Setelah diteliti ternyata anggaran berbasis kinerja berpengaruh sangat rendah terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu

---

<sup>31</sup> Esha Dening Shandi, Handoko A Hasthoro, Wika H Putri, “Kinerja Manajerial Pemerintah Dalam Perspektif Islam (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 1, Maret 2016

dengan persentase yang diperoleh 16,6%. Sedangkan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain.<sup>32</sup>

7. Herianti, Arifin S, terbitan Jurnal Al-Tsarwah 2020. Dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam”. Metode penulisan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah (1) Transparansi & akuntabilitas pemerintah Desa di Kecamatan Palakka sudah transparan & akuntabel meskipun belum sepenuhnya maksimal. Bentuk transparansinya adalah melalui pemasangan papan transparansi dan papan informasi kegiatan, serta akuntabilitasnya dituangkan dalam bentuk pertanggung-jawaban penggunaan anggaran. (2) Dampak dari tata kelola dana tersebut adalah adanya pembangunan infrastruktur yang strategis dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. (3) Dana Desa sebagai dana publik dalam perspektif keuangan publik Islam adalah didasarkan pada konsep kemaslahatan umat tanpa keluar dari nilai-nilai Islam baik itu dari sisi perolehan pendapatannya maupun dari proses belanjanya. Sebagaimana realita dilapangan dengan banyaknya bantuan hingga penjaminan sosial pemerintah desa yang diberikan mencerminkan bahwa Dana Desa sebagai dana publik telah terpenuhi sebagaimana dalam konsep islam meskipun masih dibatasi oleh regulasi.<sup>33</sup>

Dari uraian diatas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang sudah dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Perspektif Islam. Studi

---

<sup>32</sup> M. Fadhil Junery, S.El.,M.E,Sy dan Norhanisah, S.Akun, “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)”, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol. 2, No. 1, Juni 2018.

<sup>33</sup> Herianti, Arifin S, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam”, Jurnal Al-Tsarwah 2020.

Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi menjadi V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar rujukan serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

### 1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian. Penegasan judul untuk mengetahui secara rinci apa maksud dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah yang bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, kajian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mencari peneliti terdahulu yang dianggap sudah relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sistematika pembahasan yaitu untuk memberikan gambaran yang akan dibahas pada masing-masing bab.

### 2. BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu teori keagenan (*agency theory*), teori stewardship, teori kontinjensi, partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, kinerja aparat pemerintah daerah, serta kajian terhadap perspektif islam. Serta adanya pengajuan hipotesis sebagai landasan penelitian dan kerangka pemikiran.

### 3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, populasi, sampel, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis data.

### 4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dalam perspektif islam.

#### 5. BAB V Penutup

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency Theory* atau teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan *principal* dan *agent* berakar pada teori ekonomi, keputusan, sosiologi, dan organisasi. Teori keagenan menganalisis hubungan kontroktual antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak, yakni *principal*, membuat kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain, yakni *agent*. Dengan kontrak tersebut diharapkan *agent* akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*.<sup>34</sup>

Dikatakan oleh Institute of Chartered Accountants in England & Wales Dissemination, bahwa hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih *principal* (misalnya pemilik) melibatkan orang lain sebagai agen mereka untuk melakukan layanan atas nama mereka. Pelayanan *agent* tersebut merepresentasikan hasil pendelegasian berupa otoritas pengambilan keputusan yang diberikan oleh *principal* kepada *agent*. Dalam pendelegasian tersebut, *principal* harus menempatkan kepercayaan kepada *agent* untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik *principal*.<sup>35</sup>

Namun, permasalahan muncul ketika *agent* tidak menjalankan perannya dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik *principal*. *Agent* cenderung memiliki motif yang berbeda dengan *principal*. Beberapa faktor seperti imbalan keuangan, peluang pasar tenaga kerja, dan hubungan dengan pihak lain yang tidak relevan dengan *principal* menjadi salah satu penyebab perbedaan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan *agent* menjadi lebih semangat bekerja pada sektor ekonomi lain atau kinerja mereka dibawah kontrak yang disepakati. *Agent* juga mungkin lebih memilih pekerjaan dengan resiko yang lebih rendah. Dampaknya, *agent* tidak terbuka terhadap

---

<sup>34</sup> Jensen, dan Meckling, "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3, 1976

<sup>35</sup> Institute of Chartered Accountants in England and Wales Dissemination, "Audit Quality: Agency Theory and the Role of Audit, England 2005

*principal*. Hal itu menimbulkan asimetri informasi karena informasi yang dimiliki *agent* lebih tinggi daripada *principal*.

Hubungan keagenan (*principal – agent*) dapat dilihat pada hubungan antara pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat yang sebagai *principal*.<sup>36</sup> Menurut Mardiasmo, pemerintah daerah dalam hal ini berada dalam posisi *dual accountability*, akuntabilitas ganda atau dua arah, yang artinya pemerintah daerah bertindak sebagai *principal* bagi eksekutif sekaligus *agent* bagi publik atau masyarakat yang memilihnya (*voters*).<sup>37</sup> Masyarakat (*principal*) memandang bahwa pemerintah daerah (*agent*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan individu mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah. Artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan kejahatan dalam anggaran juga menjadi lebih kecil.<sup>38</sup>

Digunakannya *agency theory* ini didasari oleh tiga asumsi dasar manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Eisenhardt dan Kathleen, ada tiga asumsi dasar manusia guna menjelaskan tentang teori keagenan yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Ya'qud Ananda Gudban, *Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah*, Malang. Intrans Publishing, November 2017, hal. 18-20

<sup>37</sup> Mardiasmo, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”, Penerbit Andi, (Yogyakarta, 2002)

<sup>38</sup> Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis, *Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No.1, Oktober 2018, ISSN 2337-4314, h. 32

<sup>39</sup> Eisenhardt dan Kathleen, “*Agency Theory: An Assessment and Review*”, *Academy of Management Review* 14, 1989, hal 57-74

1. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi tentang keorganisasian berkaitan dengan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information (AI) antara principal dan agent.

3. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi berkaitan dengan informasi yang dipandang sebagai barang komoditi yang bias diperjual belikan.

## B. Teori Stewardship

Teori yang digunakan selanjutnya yakni *teori stewardship*, teori ini merupakan bagian dari teori agensi<sup>40</sup> yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan - tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah dan organisasi. Baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Pengimplikasian *teori stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa sebagai *Steward* (penatalayanan / penerima amanah / pengelola) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Dengan demikian Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan

---

<sup>40</sup> Lex Donaldson, dan James H. Davis, “*Stewardship Theory or Agency Theory of Management*, Vol. 16 No. 1”, 1991

keuangan yakni, relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.<sup>41</sup>

### C. Teori Kontinjensi

Teori kontinjensi berlandaskan pada pemikiran bahwa pengelolaan suatu organisasi dapat berjalan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi itu harus dianalisis sendiri.<sup>42</sup> Pendekatan kontinjensi memiliki tujuan untuk melihat hubungan antara variable-variabel kontinjensi dengan desain system akuntansi manajemen, selain itu untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam hal ini hubungan antara kinerja pemerintah daerah dengan partisipasi penyusunan anggaran.

Pengujian atas perbedaan – perbedaan dalam praktik pelaporan keuangan tertentu diantara berbagai negara atau atas sistem akuntansi nasional. Dalam hal tersebut, hasil yang pada umumnya diperoleh dalam suatu kesimpulan yang menghubungkan perbedaan atau persamaan, baik dalam hal sosial, politik, maupun ekonomi. Teori dalam praktik pelaporan disetiap negara dipengaruhi oleh variabel – variabel sosial tertentu. Variabel-variabel sosial yang terdiri dari beberapa faktor yang bervariasi pada setiap negara.

Suatu reformasi terhadap sistem akuntansi pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang lebih informatif merupakan faktor munculnya teori kontinjensi dalam akuntansi pemerintahan. Sistem yang lebih informatif inilah yang akan tertuju pada pasokan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk mengontrol keuangan pada kegiatan pemerintah. Teori kontinjensi digunakan untuk mengevaluasi keefektifan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Keefektifan penganggaran

---

<sup>41</sup> Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis*, Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018, ISSN 2337-4314, h. 32

<sup>42</sup> Amitai Etzioni, “*Organisasi - Organisasi Modern (terjemahan)*”, UI Press, Jakarta, 1985

partisipatif tergantung pada faktor-faktor kontekstual organisasi dan sifat psikologi karyawan.

#### D. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan proses penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan dapat sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dalam sektor publik, penganggaran merupakan tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik. Berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka. Dalam bentuk umum, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Yang mana akan direpresentasikan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.<sup>43</sup>

Menurut Cherrington pada anggaran terdapat aspek yang meliputi perencanaan, koordinasi, implementasi, pengendalian, evaluasi terhadap apa yang sudah terjadi, dan sebuah dasar pencapaian tujuan dengan memberikan penghargaan.<sup>44</sup> Pendapat ini sepadan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo.

Mardiasmo mengemukakan bahwa terdapat empat siklus anggaran dalam sektor pemerintahan yang meliputi:<sup>45</sup>

##### 1. Tahap Persiapan Anggaran

---

<sup>43</sup> Gita Pramudya Saraswati, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), hal. 16-17

<sup>44</sup> Cherrington, “Appropriate reinforcement contingencies in the budgeting process”, *Journal of Accounting Research, Supplement*, 1973, hal 225-253

<sup>45</sup> Mardiasmo, Op.cit., hal 70

Tahapan awal yang perlu dilakukan adalah menaksirkan pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, yakni dengan cara menaksirkan pendapat secara lebih akurat. Selain hal tersebut perlu disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

## 2. Tahap Ratifikasi

Tahapan selanjutnya adalah tahap pengesahan rencana anggaran yang dilakukan oleh Badan Eksekutif dengan Badan Legislatif agar menjadi anggaran final. Pada tahap ratifikasi ini pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki *managerial skill*, namun juga harus mempunyai *political skill*, dan *coalition building* yang memadai, karena tahapan ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Selain itu, pimpinan eksekutif juga harus memiliki integritas dan kesiapan mental (*coalition building*) yang sangat penting, karena harus memiliki kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.

## 3. Tahap Implementasi / Pelaksanaan Anggaran

Tahap implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan pemerintah. Manajer keuangan publik harus memiliki sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Dalam hal ini manajer keuangan publik memiliki tanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati pada tahap sebelumnya.

## 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahapan akhir pada anggaran sektor pemerintahan yaitu tahap pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi (pelaksanaan anggaran) telah didukung oleh sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan hasil pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masalah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan *plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategis. Demikian juga pada organisasi sektor publik, anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yakni penyediaan pelayanan publik yang prima.<sup>46</sup>

### E. Akuntabilitas Publik

*Accountability* atau yang biasa kita sebut dengan akuntabilitas secara harfiah merupakan “pertanggung jawaban. Menurut Mardiasmo : ”Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Akbar, “akuntabilitas adalah hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (public disclosure), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan. Tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen keuangan daerah di era kebijakan otonomi, membutuhkan pola akuntabilitas publik melalui pembangunan sistem akuntansi pemerintahan”.<sup>48</sup>

Lembaga publik memiliki tuntutan untuk mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Pertanggung

---

<sup>46</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, “*Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*” (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 22

<sup>47</sup> Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2009), hal. 20

<sup>48</sup> Akbar, “*Peran Harga Sebagai Indikator Kualitas Jasa Persepsi dan Pengaruh Terhadap Kemungkinan Membeli Konsumen*”, Fokus Manajerial, Vol. 2 No. 2, 2011, hal 101

jawaban ini lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.

Terdapat beberapa dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik. Menurut Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi sektor publik, yaitu:<sup>49</sup>

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan tahapan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas baik dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses juga berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan alternatif program apakah yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan - kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR / DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas bagian yang tak terpisahkan dari ilmu manajemen, sehingga dalam pengelolaan dana desa yang merupakan

---

<sup>49</sup> Sheila Ellwood, "*Paris and Town Council: Financial Accountabiliti and Management*", Vol. 19, (London: Prentice Hall, 1993)



dana publik dalam perspektif keuangan publik Islam yang berdasarkan pada konsep kemaslahatan umat, dari sisi perolehan pendapatannya maupun dari proses penggunaannya tanpa keluar dari nilai-nilai Islam. Hal tersebut dapat terwujud jika dibarengi dengan tata kelola atau ilmu manajemen yang baik dari para aparatur pemerintah sehingga tercipta *output* atau hasil yang baik.<sup>50</sup>

## F. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja aparat pemerintah merupakan hasil kerja keras manajer publik secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Wulandari menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja sektor publik merupakan sistem yang digunakan untuk membantu para manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena didalam pengukuran kinerja terdapat *reward and punishment system*.<sup>51</sup>

Berbeda dengan Heidjrachman dan Husnan yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan untuk:<sup>52</sup>

1. Memperbaiki kinerja karyawan
2. Menyesuaikan kompensasi (misalnya membantu mengambil keputusan dalam menentukan upah, kenaikan upah, bonus, dan kompensasi lainnya).
3. Keputusan penempatan
4. Mengetahui pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>50</sup> Herianti, Arifin S. Jurnal Al- Tsarwah, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam*. 2020

<sup>51</sup> Wulandari, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating", 2011

<sup>52</sup> Ranupandjojo Heidjrachman, dan Suad Husnan, "Manajemen Personalialia", Edisi IV, (Yogyakarta: BPF, 2002), hal. 15

5. Perencanaan dan pengembangan karier
6. Penyimpangan proses staffing
7. Informasi yang tidak akurat
8. Desain pekerjaan yang salah
9. Kesempatan kerja yang adil
10. Tantangan eksternal

Adapun aspek – aspek yang dinilai dalam kinerja menurut Hassibuan dalam Mangkunegara (2014) adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Kerjasama  
Berpatisipasi satu dengan yang lainnya, secara vertikal maupun horizontal, di dalam maupun di luar pekerjaan.
2. Tanggung Jawab  
Penilaian kebijaksanaan karyawan dari hasil kerjanya, sarana prasarana yang dipergunakan, serta prilaku kerjanya.
3. Kedisiplinan  
Menilai karyawan dalam mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Sikap  
Menilai kesopanan, periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar.
5. Kreativitas  
Suatu kemampuan dalam mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna.
6. Kejujuran  
Penilaian kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas – tugasnya, memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri dan terhadap orang lain.
7. Inisiatif  
Kemampuan berfikir yang orisinil dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, memberikan alasan, mendapatkan

---

<sup>53</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014

kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya.

8. Hasil kerja

Menilai baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan dari pekerjaannya.

9. Kesetiaan

Kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Dengan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari orang – orang yang tidak bertanggung jawab.

## G. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Tujuan utama dari sistem akuntansi adalah untuk membantu akuntabilitas. Dalam masyarakat Islam, pengembangan teori akuntansi harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam sangat jelas bahwa prinsip-prinsip dasar bagaimana pelaporan keuangan dan praktik akuntansi harus dilakukan.

Islam memberikan pemahaman yang sangat komprehensif pada semua aspek kehidupan baik mengenai agama, moral, etika, sosial-budaya, ekonomi, politik, atau hukum untuk mendukung fondasi masyarakat Islam yang kuat. Demikian pula pemahaman mengenai kepemimpinan melalui sistem etika yang sangat maju dan modern yang berpedoman dari Al Qur'an, Sunnah, dan perkataan Nabi Muhammad SAW.<sup>54</sup>

Menurut Zakaria, salah satu tujuan penciptaan manusia untuk mengabdikan dan menghambangkan diri kepada Allah SWT (ibadah).<sup>55</sup> Tujuan ini mendidik manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, karena ibadah dapat dikatakan sempurna apabila dilaksanakan atas dasar

---

<sup>54</sup> Toor, *An Islamic Leadership Theory: Exploring the Extra Dimensions. Proceeding of the International Conference on Management from Islamic Perspectives (ICMIP)*, Kuala Lumpur Malaysia, 2007

<sup>55</sup> Zakaria, "*Mu'jam Al – Maqayis fi Lughah*", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

landasan iman kepadaNya. Selain itu tujuan penciptaan manusia selanjutnya yaitu mengemban amanah. Yaitu kesanggupan manusia dalam memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syati, dengan adanya amanah dapat mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah yang diamanahkan tersebut. Supaya amanah yang sudah ditetapkan tersebut tidak dikhianati, baik amanah dari Allah SWT dan RasulNya maupun amanah antara sesama manusia. Selain itu manusia juga dididik untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya karena kelak di akhirat akan dihisab untuk menerima imbalan pahala jika patuh terhadap amanah tersebut dan balasan azab jika tidak mematuhi. Tak seorang pun dapat menggantikan kedudukan orang lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tak seorang pun lolos tanpa pembalasan.<sup>56</sup>

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diurai dari kerangka pemikiran. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa variabel pada penelitian, baik dua maupun lebih.<sup>57</sup>

### 1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara

---

<sup>56</sup> Aisyah Bintu Syati, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, Penerjemah: Ali Zawawi, judul asli: *Maqal fi al-Insan*, Dirasah Quraniyyah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hal 53

<sup>57</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

memenuhi pengeluaran tersebut.<sup>58</sup> Partisipasi anggaran merupakan sebuah proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran Chong (2002) dalam Prihandini (2011).<sup>59</sup>

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Aparat pemerintah daerah dalam pemerintahan memiliki pertanggungjawaban dari semua aktivitas, baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya. Dengan adanya partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggung jawab serta kinerja dari manajer level bawah dan menengah. Manajer dapat menyampaikan ide-ide kreatif yang dimilikinya kepada manajer atas, yang mana ide tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari adanya keikutsertaan para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran, maka akan didapatkan keputusan yang lebih nyata sehingga tercipta kesesuaian tujuan perusahaan yang lebih besar.<sup>60</sup> Rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

## **2. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

---

<sup>58</sup> Abdul Halim, dan Muhammad Syam Khusufi, *“Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hal 47

<sup>59</sup> Prihandini, *“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, (Salemba Empat: 2011)

<sup>60</sup> Octavia Diyah, *“Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT POS Indonesia (PERSERO) Medan”*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2009

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>61</sup> Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Semakin akuntabel suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.<sup>62</sup>

Eksistensi Pemerintah Desa sebagai *Steward* (penatalayanan / penerima amanah / pengelola) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Dengan demikian Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yakni, relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh positif Akuntabilitas Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

---

<sup>61</sup> Mardiasmo, Lop.cit

<sup>62</sup> Deddi Noerdiawan, “*Akuntansi Sektor Publik*” Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2010)

### **3. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah**

Partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik merupakan peran penting dalam pencapaian kinerja aparat pemerintah daerah yang baik dalam suatu instansi pemerintah daerah. Komponen ini dapat mencegah meminimalisir kasus penyelewengan serta pemborosan atau bahkan dihapuskan, karena kinerja aparat pemerintah dapat dinilai dan diawasi langsung oleh publik. Maka dari itu partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.<sup>63</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik akan menjadikan kinerja aparat pemerintah menjadi baik. Rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh positif signifikan partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah secara bersama-sama (simultan).

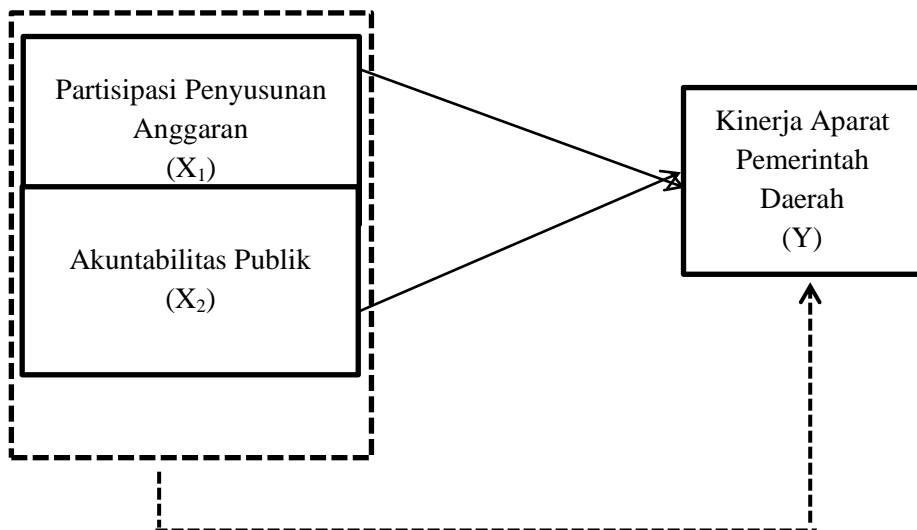
#### **I. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang terdiri dari Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik. Sedangkan variabel dependennya hanya satu yaitu Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Model konseptual penelitian secara skematis dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis pada gambar berikut ini :

---

<sup>63</sup> Asrini, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kota Palu*” Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1,2017

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran diatas, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, baik secara parsial maupun secara simultan atau bersama-sama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah positif dan signifikan dengan nilai signifikan  $0,004 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
2. Berdasarkan hasil penelitian uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah positif dan signifikan dengan nilai signifikan  $0,024 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
3. Partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini dinyatakan dengan hasil penelitian pada uji simultan (uji F) dengan nilai F hitung  $> F$  tabel ( $5,264 > 3,128$ ), dan signifikansinya  $0,002 < 0,05$ . Dengan kata lain partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi dan akuntabilitas publik yang tinggi dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah pada desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.
4. Dalam hukum negara maupun hukum agama, sebuah amanah harus dipertanggung jawabkan. Berdasarkan penelitian ini penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik dilakukan untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas publik akan mendorong tercapainya transparansi dan akuntabilitas dana desa yang nantinya akan menciptakan perkembangan dan

kemajuan yang baik bagi desa, serta tepat sasaran dimana saja dana desa yang paling dibutuhkan guna pemerataan pembangunan desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat pemerintah daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam menyusun strategi yang lebih tepat sasaran supaya dengan mudah mencapai target sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada waktunya. Terutama dalam keterlibatan, kontribusi, dan memberikan masukan atau opini dalam penyusunan anggaran. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban disajikan secara akuntabel sehingga nantinya kinerja aparat pemerintah daerah akan lebih meningkat dari pada sebelum-sebelumnya.
2. Bagi penulis selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian yang sejenis dengan variabel yang berbeda serta memperbanyak jumlah sampel penelitian agar dapat mewakili karakteristik responden yang ingin diteliti serta mendapatkan hasil yang lebih akurat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, “*Peran Harga Sebagai Indikator Kualitas Jasa Persepsi dan Pengaruh Terhadap Kemungkinan Membeli Konsumen*”, Fokus Manajerial, Vol. 2 No. 2, 2011.
- Angraini, Maria Rosa Ratna Sari, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul* Jogjakarta(Modus), 2016, Volume 28.
- Arifin, Solikhun, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi*”, Semarang.2012
- Cherrington, “*Appropriate reinforcement contingencies in the budgeting process*”, *Journal of Accounting Research, Supplement*, 1973
- Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, Diponegoro, 2005), Q.S An – Nisa : 58
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Diyah, Octavia, “*Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT POS Indonesia (PERSERO) Medan*”, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2009
- Donaldson, Lex, dan James H. Davis, “*Stewardship Theory or Agency Theory of Management*, Vol. 16 No. 1”, 1991
- Eisenhardt dan Kathleen, “*Agency Theory: An Assessment and Review*”, *Academy of Management Review* 14, 1989.
- Ellwood, Sheila, “*Paris and Town Council: Financial Accountabiliti and Management*”, Vol. 19, (London: Prentice Hall, 1993)
- Ernawilis.2015. *Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD dengan pengawasan internal*

- sebagai variabel pemoderasi Kabupaten Kuantang Singing*. Jom fekom, 2(2).
- Etzioni, Amitai, “*Organisasi - Organisasi Modern (terjemahan)*”, UI Press, Jakarta, 1985
- Gudban, Ya’qud Ananda, *Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah*, Malang. Intrans Publishing. November 2017
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Khusufi, “*Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Heidjrachman, Ranupandjojo, dan Suad Husnan, “*Manajemen Personalia*”, Edisi IV, (Yogyakarta: BPFE, 2002).
- Herianti, Arifin S. Jurnal Al- Tsarwah, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam*. 2020
- Husman, Husain, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumiaksara, 1996)
- [id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi), diakses pada 25 Desember 2020
- Institute of Chartered Accountants in England and Wales Dissemination, “Audit Quality: Agency Theory and the Role of Audit*, England 2005
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN, 1998).
- Iznillah, Muhammad Luthfi, Amir Hasan & Yesi Mutia, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis*, Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018, ISSN 2337-4314,
- Jensen, dan Meckling, “*Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership structure*”, *Journal of Finance Economic* 3, 1976
- Julyarsyah, Umillah Riswaraji, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Motivasi, Dan Job Relevant Information Sebagai Variable Moderasi*”, (Jakarta. 2020)

- Kadir, *Statistik Terapan Edisi 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Kadir, Abdul”*Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqih Anggaran Hukum Ekonomi Syariah*”, *Al-Amwal:Journal of Islamic Economic Law*, vol 1 No 1, September 2016
- Kusuma, Budi Hartono, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi*.*Jurnal Akuntansi* Vol.8 No.2 2016.
- Manan, Abdul, *Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)*, Lampung.2020
- Mangkunegara, Anwar Prabu, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)
- Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2009)
- \_\_\_\_\_, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”, (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2002)
- Nazaruddin, Ietje, dan Henry Setyawan, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi, dan Job Relevant Information sebagai Variabel Moderasi*”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12 No. 2, Juli 2012
- Noerdiawan, Deddi, “*Akuntansi Sektor Publik*” Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2010)
- Nurhayati, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*, VOL 1 No 1, Oktober 2019
- Nuryuliana, “*Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*” (Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 37 Tahun 2007, tentang pengelolaan keuangan desa, Bab I, Pasal 1, ayat 2.
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta, 2015.*
- Prandara, Roni, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat, Studi kasus Desa Waringin Barat, Lampung, 2020.*
- Prihandini, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, (Salemba Empat: 2011)
- Putri, Hafiza Eka, *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru)*, Riau.2019
- Putri, Rosydalina, “*Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Bank Syariah*”, Jurnal Fidusia Vol 4, No. 1, April 2021
- Riadi, Muchlisin, “Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi, dan Jenis-Jenis)” Kajian Pustaka, Januari 09, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsip-dimensi-dan-jenis.html>, diakses pada 25 Desember 2020
- Saraswati, Gita Pramudya “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating*”,(Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta,2015)
- Sarjito, Bambang dan Osmad Muthaher. 2007. “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*”. SMA X Makassar.

- Setyowati, Lilis, Purwantoro, “Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dan Kepuasan Kerja Pada Pemerintahan Kota Semarang”, *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi*, Vol 21 No. 2.
- Sinuraya, Candra, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajer: Peran Kecukupan Anggaran dan Job-Relevant Information sebagai Variabel Intervening*”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 1 Mei 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta,2012)
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)
- Supriadi, Dedi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pusaka Seti, 2013).
- Syafiq, Ahmad, *Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat ZISWAF* Volume 3. No. 1 juni 2016.
- Syati, Aisyah Bintu, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an*, Penterjemah: Ali Zawawi, judul asli: Maqal fi al-Insan, *Dirasah Quraniyyah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).
- Tuerah, Raykes H, Jenny Morasa, *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Manado*, *Jurnal Accountability* Volume 2 Nomor 1, Juni 2013
- Toor, *An Islamic Leadership Theory: Exploring the Extra Dimensions. Proceeding of the International Conference on Management from Islamic Perspectives (ICMIP)*, Kuala Lumpur Malaysia, 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah BAB I, pasal I ayat 43, h 7, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa BAB I, pasal I ayat I*
- Wulandari, “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja*

*dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*”, 2011

Ya'qub Ananda Gudban, *Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah* (Malang: Intrans Publishing), November 2017

Yunas, “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah”, Surakarta, 5 Februari 2016

Zakaria, “*Mu'jam Al – Maqayis fi Lughah*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)



**KUESIONER PENELITIAN**  
**PRODI AKUNTANSI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, dengan membantu menjawab berbagai pernyataan dalam kuesioner ini. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sangat membantu keberhasilan penelitian yang akan dilakukan. Mohon dengan sangat, agar Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menjawab kuesioner ini secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i tidak akan mempengaruhi karir, informasi yang diberikan akan terjamin kerahasiaanya.

**A. Identitas Peneliti**

NAMA : SAHITA NUR WIDIANI  
 NPM : 1751030124

JUDUL PENELITIAN : “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dalam Perspektif Islam”

**B. Identitas Responden**

Nama Responden :  
 Jenis Kelamin :  
 Usia :  
 Status Jabatan :  
 Pendidikan Terakhir :

**C. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Pernyataan yang berkaitan dengan Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kecamatan Abung Surakarta

Kabupaten Lampung Utara. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pernyataan dengan memberi tanda silang (X) pada kolom jawaban yang dianggap tepat, dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- ❖ Sangat Setuju (SS) : 5
- ❖ Setuju (S) : 4
- ❖ Ragu – ragu (RR) : 3
- ❖ Tidak Setuju (TS) : 2
- ❖ Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

#### D. Daftar Pertanyaan

➤ Variabel Kinerja Aparat (Y)

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Target kerja dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan					
2	Anggaran yang ditetapkan sesuai dengan realisasi anggaran					
3	Hasil sesuai dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya					
4	Hasil kegiatan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat					
5	Pencapaian realisasi belanja dengan standar belanjanya					

	(Efisiensi Operasional)					
6	Ikut berperan aktif dalam memperoleh informasi dalam organisasi untuk menyesuaikan laporan dan mengkoordinasikannya					
7	Hasil yang diperoleh dapat diselesaikan dengan kualitas dan kuantitas yang baik					
8	Adil (equiry) dan merata (equaliry) dalam pengelolaan anggaran, dimana ada kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas					

Sumber :Wulandari (2011)

➤ Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1)

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1

1	Dalam proses penyusunan anggaran, program dan kegiatan, semua pihak ikut dilibatkan					
2	Ikut berkontribusi dalam menyampaikan pendapat, saran, dan opini					
3	Atasan selalu memberikan alasan yang logis dalam merevisi anggaran yang telah disusun					
4	Meminta pendapat atas usulan yang saya berikan disetiap penyusunan anggaran.					
5	Atasan sangat berpengaruh penting disetiap finalisasi penyusunan anggaran					

Sumber : Nurcahyani (2010)

➤ Variabel Akuntansi Publik (X2)

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pelaksanaan kebijakan anggaran dipertanggung jawabkan pemerintah dalam laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat luas					
2	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hokum dan peraturan yang berlaku					
3	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik					
4	Dilakukan audit kepatuhan dan					

	pengawasan berkelanjutan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku					
5	Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat					
6	Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan					
7	Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan					

Sumber : Muh Agus (2017)

**REKAPITULASI DATA RESPONDEN**

Responden	PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN					TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	X1
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	5	5	4	22
4	5	4	5	4	5	23
5	4	4	4	5	5	22
6	5	5	4	5	4	23
7	4	5	5	5	4	23
8	4	4	4	4	4	20
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	4	4	5	5	4	22
12	4	4	5	4	5	22
13	5	5	4	5	4	23
14	5	4	4	5	5	23
15	4	5	4	5	4	22
16	4	5	5	5	4	23
17	4	4	4	4	4	20
18	5	5	5	4	5	24
19	4	5	5	5	5	24
20	4	5	5	5	5	24
21	5	4	5	5	4	23
22	5	4	5	4	5	23
23	4	5	5	4	5	23
24	4	4	4	5	5	22
25	5	5	4	5	4	23
26	5	5	5	5	4	24

27	5	4	4	4	4	21
28	4	4	5	5	4	22
29	4	4	5	4	5	22
30	5	4	4	5	5	23
31	4	5	4	5	4	22
32	4	5	5	5	4	23
33	5	5	5	5	5	25
34	4	5	5	5	5	24
35	5	4	5	5	4	23
36	5	4	5	4	5	23
37	4	5	4	5	5	23
38	5	5	4	5	4	23
39	4	4	5	5	4	22
40	4	4	4	4	5	21
41	5	5	5	4	5	24
42	5	5	5	5	5	25
43	4	5	4	4	4	21
44	5	4	4	5	5	23
45	4	5	5	5	4	23
46	5	4	5	5	5	24
47	4	4	4	5	5	22
48	5	5	4	5	4	23
49	5	5	5	5	4	24
50	5	4	4	4	4	21
51	4	5	5	5	4	23
52	5	4	5	5	5	24
53	4	4	5	5	4	22
54	4	4	5	4	5	22
55	4	4	4	5	5	22
56	5	5	4	5	4	23
57	4	5	5	5	4	23



58	5	4	4	4	5	22
59	4	5	5	4	5	23
60	5	4	5	5	5	24
61	4	4	5	5	5	23
62	5	5	5	5	5	25
63	4	5	5	5	5	24
64	5	4	5	5	4	23
65	4	4	5	4	5	22
66	5	5	4	5	4	23
67	4	4	4	4	5	21
68	4	4	4	5	4	21
69	5	5	5	5	5	25
70	4	5	5	5	5	24
71	5	4	5	5	4	23
72	4	4	5	4	5	22

Responden	AKUNTABILITAS PUBLIK							TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	X2
1	5	5	4	5	5	5	4	33
2	5	5	4	4	4	3	3	28
3	4	4	5	5	4	5	5	32
4	5	4	5	3	5	5	3	30
5	5	4	4	3	5	5	4	30
6	4	5	4	4	5	4	5	31
7	4	5	5	5	3	5	4	31
8	4	4	5	4	4	5	5	31
9	5	5	4	5	4	5	4	32
10	5	5	4	5	3	5	4	31
11	4	4	4	4	4	3	4	27
12	5	4	5	5	5	4	5	33
13	4	5	4	5	5	3	5	31

14	5	4	4	5	5	5	5	33
15	4	5	5	3	5	5	4	31
16	4	5	5	4	4	3	4	29
17	4	3	3	4	5	4	5	28
18	5	4	4	5	5	4	3	30
19	5	5	4	3	4	5	5	31
20	5	5	5	5	4	5	4	33
21	4	4	5	5	5	5	4	32
22	5	4	3	4	3	4	4	27
23	5	5	4	4	5	5	4	32
24	5	4	4	4	5	4	5	31
25	4	5	5	4	4	3	5	30
26	4	5	4	5	4	5	4	31
27	4	4	4	5	5	5	4	31
28	4	4	5	5	3	5	3	29
29	5	4	3	5	5	4	5	31
30	5	4	5	3	5	5	4	31
31	4	5	5	4	5	4	5	32
32	4	5	5	4	5	4	3	30
33	5	5	4	5	4	4	4	31
34	5	5	3	4	5	4	5	31
35	4	3	3	5	4	5	5	29
36	5	4	4	4	5	4	5	31
37	5	5	5	4	3	4	4	30
38	4	4	5	4	4	4	4	29
39	4	4	5	4	5	4	3	29
40	5	4	4	4	5	3	4	29
41	5	5	4	5	4	5	5	33
42	5	5	3	4	5	4	4	30
43	4	5	4	5	5	5	5	33
44	5	4	5	5	5	5	4	33

45	4	5	5	4	4	4	4	30
46	5	4	5	4	5	4	5	32
47	5	4	5	5	4	5	5	33
48	4	5	5	4	5	4	4	31
49	4	5	5	3	4	5	5	31
50	4	3	4	4	4	4	5	28
51	4	5	3	4	5	5	5	31
52	5	4	5	3	5	5	4	31
53	4	4	5	4	4	4	3	28
54	5	4	4	3	4	3	4	27
55	5	4	5	5	4	5	5	33
56	4	5	3	4	5	4	5	30
57	4	5	5	4	3	5	5	31
58	5	4	4	5	5	4	5	32
59	5	5	4	5	4	3	5	31
60	5	4	5	5	3	4	5	31
61	5	4	5	5	4	5	4	32
62	5	5	5	4	5	5	3	32
63	5	5	4	4	5	5	5	33
64	4	4	4	4	5	4	5	30
65	5	4	4	3	4	5	4	29
66	4	5	5	5	4	5	5	33
67	5	4	4	5	5	5	5	33
68	4	4	5	4	4	4	5	30
69	5	5	4	5	5	4	3	31
70	5	5	5	4	5	5	4	33
71	4	4	4	3	5	5	4	29
72	5	4	3	5	4	3	5	29

Responden	KINERJA APARAT PEMERINTAH								TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Y
1	5	4	5	5	5	3	3	4	34
2	4	4	5	4	4	4	3	2	30
3	5	4	4	3	5	4	2	4	31
4	5	4	5	5	5	3	2	4	33
5	4	5	5	4	4	4	3	2	31
6	4	5	5	4	5	4	4	3	34
7	5	4	4	5	5	3	3	2	31
8	5	5	4	5	5	4	3	2	33
9	5	4	5	5	3	3	2	2	29
10	5	4	5	5	4	4	3	4	34
11	5	5	5	4	4	4	4	2	33
12	5	5	4	4	5	4	4	3	34
13	4	4	4	4	3	4	2	2	27
14	5	4	4	3	5	4	5	4	34
15	5	4	5	5	5	3	3	2	32
16	5	4	5	5	5	4	4	3	35
17	5	4	4	3	5	4	4	3	32
18	4	5	4	4	5	3	2	2	29
19	4	5	5	5	3	3	4	3	32
20	4	4	5	4	4	2	2	4	29
21	5	5	4	5	4	3	4	3	33
22	5	5	4	5	3	4	4	2	32
23	4	4	4	4	4	4	4	2	30
24	5	4	5	5	5	4	3	4	35
25	4	5	4	5	5	3	3	4	33
26	5	4	4	5	5	4	3	2	32
27	4	5	5	3	5	3	4	4	33
28	4	5	5	4	4	4	3	2	31
29	4	4	3	4	5	3	4	5	32

30	5	5	4	5	5	4	3	5	36
31	5	4	4	5	5	3	5	4	35
32	4	5	4	5	4	4	4	4	34
33	4	5	3	5	4	3	4	2	30
34	4	4	4	3	4	4	3	2	28
35	5	5	5	4	5	3	4	2	33
36	4	5	5	3	5	3	4	4	33
37	4	5	5	5	5	4	4	4	36
38	5	3	5	5	4	4	4	3	33
39	5	4	4	3	4	4	3	4	31
40	3	4	5	4	5	4	2	2	29
41	4	5	5	4	5	3	4	4	34
42	4	3	4	5	5	3	2	2	28
43	5	5	4	5	4	3	3	4	33
44	5	5	5	5	4	4	4	4	36
45	4	4	3	4	4	4	3	2	28
46	4	4	5	5	4	4	3	4	33
47	4	4	5	4	5	4	4	4	34
48	5	4	4	3	5	4	5	2	32
49	4	5	4	5	4	4	4	2	32
50	4	5	5	5	4	3	2	2	30
51	5	5	5	5	3	3	2	4	32
52	3	5	5	5	5	4	4	3	34
53	5	3	5	5	4	3	3	3	31
54	5	4	5	4	3	4	4	4	33
55	5	4	5	4	3	4	2	4	31
56	4	5	4	4	4	4	3	2	30
57	3	4	5	4	3	3	3	2	27
58	3	5	4	5	5	4	4	2	32
59	5	4	3	5	5	4	3	2	31
60	4	5	5	4	4	4	3	4	33

61	4	5	4	5	5	4	4	3	34
62	5	5	3	4	5	4	4	2	32
63	5	5	4	5	4	3	3	4	33
64	5	4	5	5	4	3	2	4	32
65	4	4	5	5	5	4	4	2	33
66	4	4	5	4	5	4	4	3	33
67	4	3	4	5	5	3	4	3	31
68	5	5	4	5	5	4	3	2	33
69	4	5	5	5	5	4	4	4	36
70	5	4	4	4	5	4	4	4	34
71	4	5	5	4	4	4	4	4	34
72	5	4	5	5	5	4	4	3	35

## LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kondisi geografis di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara?

**Jawab :** Kecamatan Abung Surakarta merupakan kecamatan tertua sebelum berubah nama menjadi Abung Surakarta pada tahun 2000. Kecamatan Abung Surakarta yang berada di Kabupaten Lampung Utara memiliki luas wilayah 110,60 KM dengan kondisi topografi yang datar. Jarak dari Kecamatan Abung Surakarta dengan ibu kota Kabupaten sekitar 23 KM, dalam waktu tempuh sekitar 45 menit. Berbatasan langsung dengan Kab. Tulang Bawang Barat di sebelah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Abung Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Lampung Tengah, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Abung Selatan dan Abung Semuli

2. Bagaimana kondisi demografis di Kecamatan Abung Surakarta, berdasarkan jenis kelamin?

**Jawab :** Dari data kependudukan yang diperoleh, jumlah penduduk di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 berjumlah 29.344 orang. Dengan jumlah laki-laki 14.904 orang dan 14.440 orang jumlah perempuan.

3. Bagaimana kondisi demografis di Kecamatan Abung Surakarta, berdasarkan mata pencaharian?

**Jawab :** Mata pencarian sebagai TNI / POLRI dengan jumlah 189 orang, aparatur sipil Negara dengan jumlah 574 orang, wiraswasta 8.950 orang, buruh dengan jumlah 6.698 orang dan yang paling mayoritas adalah petani dengan jumlah 12.923 orang.

4. Desa apasaja yang berada di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara?

**Jawab :** Kecamatan Abung Surakarta merupakan kecamatan yang terdiri dari desa-desa transmigrasi, terdapat 9 desa di Kecamatan Abung Surakarta yaitu: Purbasakti, Tatakarya, Bandar Sakti, Bumi Restu, Bumi Raharja, Sukoharjo, Bandar Abung, Bangun Sari, Karyasakti.

5. Siapa sajakah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada pemerintah desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara?

**Jawab :** Dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan program, dan penyusunan kegiatan harus melibatkan semua pihak, baik masyarakat, atasan, terutama aparat pemerintah daerah. Mereka berkontribusi dalam menyampaikan pendapat, saran, dan opini. Adil dan merata dalam pengelolaan anggaran, untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun aparat pemerintah daerah yang terlibat adalah Kepala Desa / Lurah, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Tidak semua Kaur dan Kasi yang terlibat dalam proses hanya bagian tertentu yaitu, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Kesejahteraan.

6. Bagaimana pengalokasian dana desa yang telah disusun dalam anggaran pada pemerintahan desa di Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara?

**Jawab :** Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa. Pengalokasian dana desa untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat seperti, pengembangan kesehatan, pembinaan dan pengelolaan pendidikan.



Selain itu juga digunakan untuk pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana desa.

7. Apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dan tepat sasaran dengan kepentingan masyarakat bersama di Desa Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara?

**Jawab** : Penyusunan anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target tujuan kepentingan publik, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku. karena kebijakan anggaran harus dipertanggungjawabkan pemerintah dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat luas.

8. Apakah dana desa yang di anggarkan aparat pemerintah daerah pada desa-desa dikecamatan Abung Surakarta sudah dipertanggung jawabkan pemerintah dalam bentuk laporan keuangan?

**Jawab** : Seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

## B. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	72	20	25	23.14	1.714
X2	72	26	33	29.93	1.960
Y	72	28	37	33.14	2.591
Valid N (listwise)	72				

## C. Hasil Uji Validitas X1

Correlations							
		P1.X1	P2.X1	P3.X1	P4.X1	P5.X1	X1
P1.X1	Pearson Correlation	1	.625**	.601**	.331**	.009	.679**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.005	.937	.000
	N	72	72	72	72	72	72
P2.X1	Pearson Correlation	.625**	1	.645**	.631**	.185	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.120	.000
	N	72	72	72	72	72	72
P3.X1	Pearson Correlation	.601**	.645**	1	.601**	.267*	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.023	.000
	N	72	72	72	72	72	72
P4.X1	Pearson Correlation	.331**	.631**	.601**	1	.385**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000		.001	.000
	N	72	72	72	72	72	72
P5.X1	Pearson Correlation	.009	.185	.267*	.385**	1	.516**



P4.X 2	Pearson	.308**	.186	.387**	1	.304**	.175	.272*	.604*
	Correlation								*
	Sig. (2-tailed)	.009	.118	.001		.009	.141	.021	.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
P5.X 2	Pearson	.202	.040	.234*	.304**	1	.181	.282*	.504*
	Correlation								*
	Sig. (2-tailed)	.088	.740	.047	.009		.128	.017	.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
P6.X 2	Pearson	.353**	.266*	.231	.175	.181	1	.643**	.552*
	Correlation								*
	Sig. (2-tailed)	.002	.024	.051	.141	.128		.000	.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
P7.X 2	Pearson	.548**	.414**	.359**	.272*	.282*	.643**	1	.739*
	Correlation								*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.021	.017	.000		.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72
X2	Pearson	.739**	.631**	.696**	.604**	.504**	.552**	.739**	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



P5. Y	Pearson Correlation	.093	.309*	.397*	.526*	1	.330*	.418*	.332*	.647*
	Sig. (2-tailed)	.437	.008	.001	.000		.005	.000	.004	.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72
P6. Y	Pearson Correlation	.077	.310*	.305*	.289*	.330*	1	.583*	.402*	.600*
	Sig. (2-tailed)	.519	.008	.009	.014	.005		.000	.000	.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72
P7. Y	Pearson Correlation	.114	.307*	.493*	.539*	.418*	.583*	1	.558*	.749*
	Sig. (2-tailed)	.338	.009	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72
P8. Y	Pearson Correlation	.033	.205	.274*	.290*	.332*	.402*	.558*	1	.578*
	Sig. (2-tailed)	.781	.085	.020	.013	.004	.000	.000		.000
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Y	Pearson Correlation	.468*	.727*	.792*	.799*	.647*	.600*	.749*	.578*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**F. Hasil Uji Reliabilitas X1****Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.788	5

**G. Hasil Uji Reliabilitas X2****Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.745	7

**H. Hasil Uji Reliabilitas Y****Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.827	8

**I. Hasil Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

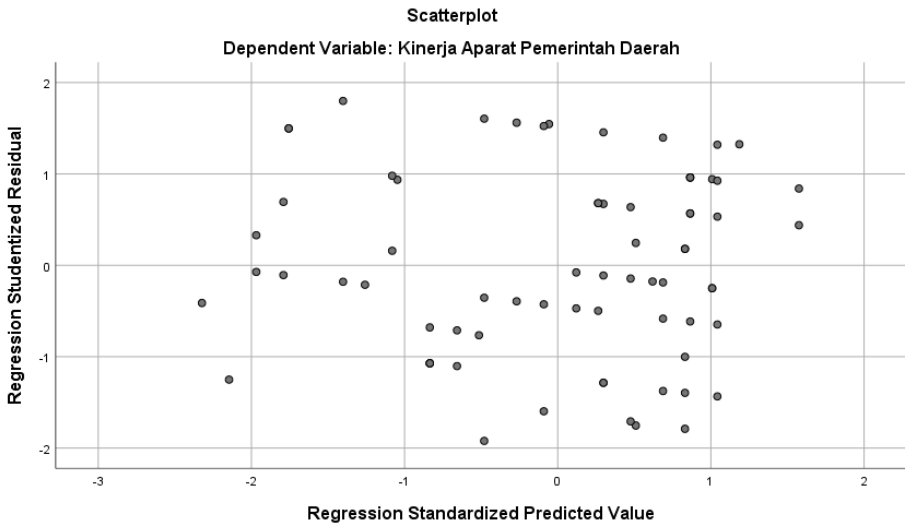
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.54471980
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.070
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**J. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**K. Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	-.340	5.977		-.090	.972		
Partisipasi Penyusunan Anggaran	.276	.180	.183	2.537	.004	.991	1.009
Akuntabilitas Publik	.186	.157	.365	2.550	.024	.991	1.009



a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

### L. Hasil Uji t

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-.340	5.977		-.090	.972
	X1	.276	.180	.183	2.537	.004
	X2	.186	.157	.365	2.550	.024

a. Dependent Variable: Y

### M. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.844	2	8.422	5.264	.002 <sup>b</sup>
	Residual	459.768	69	6.663		
	Total	476.611	71			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						



## N. Dokumentasi Penelitian











**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jendral Sudirman. No. 01 Telp. (0724) 2100, 21329, 21443 Fax. (0724) 22706

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 45 / 57-LU / 2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANDA PANGLIMA ROMADHON, SE  
NIP : 19820622 201001 1 006  
Pangkat / Gol : PENATA TK.I ( III/d )  
Jabatan : CAMAT ABUNG SURAKARTA  
INSTANSI : Kabupaten Lampung Utara

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Saudari :

Nama : SAHITA NUR WIDLANI  
Tempat/Tgl. Lahir : B.Agung, 11 Juni 1999  
NPM : 1751030124  
Program Studi : Akutansi syariah  
Alamat : Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten  
Lampung Utara Provinsi Lampung

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Desa Se-Kecamatan Abung Surakarta tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dalam Perspektif Islam pada bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatakarya, 06 Februari 2023

Yang Membuat Keterangan  
**CAMAT ABUNG SURAKARTA,**



**GANDA PANGLIMA ROMADHON,SE**

Penata Tk.I

NIP. 19820622 201001 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-0946 /Un.16 / P1 /KT/V/ 2023

**Assalamu 'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK  
 TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
 (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**  
 Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
SAHITA NUR WIDIANI	1751030124	FEBI/ AKS

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 15 % dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 29 Mei 2023  
 Kepala Pusat Perpustakaan



**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



PENGARUH PARTISIPASI  
PENYUSUNAN ANGGARAN DAN  
AKUNTABILITAS PUBLIK  
TERHADAP KINERJA APARAT  
PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM

*by Sahita Nur Widiani*

---

**Submission date:** 29-May-2023 09:12AM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2104126196  
**File name:** TURNITIN-\_SAHITA\_NUR\_WIDIANI.docx (150.48K)  
**Word count:** 10124  
**Character count:** 67927

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN  
AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA APARAT  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Korea National University of Transportation Student Paper	3%
2	Rekha Melinda, Fadli Fadli. "FAKTOR PENENTU KINERJA MANAJERIAL SKPD DI KOTA BENGKULU", JURNAL FAIRNESS, 2021 Publication	1%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	Sonia Sischa Eka Putri, Pivit Septiary Chandra. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar", Owner, 2021 Publication	1%
5	Ayu Sari Miswati, Dyah Aring Hepiana Lestari, Lina Marlina. "PENDAPATAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF KELUARGA PETANI ALIH KOMODITI PADI KE KARET DI KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA", Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis, 2020 Publication	1%
6	Submitted to Handong Institute for International Development Cooperation Student Paper	1%

7	Didik Prayitno, Einde Evana, Usep Syaipudin. "PENGARUH BUDGET PLANNING MODEL TERHADAP KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2019 Publication	1%
8	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
10	Khoirul Mustofa. "Pengaruh Evaluasi Pelatihan, Perencanaan Karir Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung", Otonomi, 2022 Publication	1%
11	Evi Marlina, Sri Rahmayanti, Ameilia Dwi Rur Afdilah Futri. "Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau", Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 2021 Publication	1%
12	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1%
14	I Gusti Ayu Ratih Utariani, I Gusti Agung Krisna Lestari, Sarita Vania Clarissa. "PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, MOTIVASI KERJA, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA OPD DI	<1%

## KABUPATEN BADUNG", Journal Research of Accounting, 2022

Publication

15	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
16	Goodwill Jurnal. "Goodwill Vol. 6 No. 1 Juni 2015", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2015 Publication	<1 %
17	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
18	Harry Eka Setiawan, Muhammad Safri. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2016 Publication	<1 %
19	Maskan AF. "KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF ETIKA PUBLIK", DEDIKASI, 2020 Publication	<1 %
20	Leli Piska Yumame, Meinarni Asnawi, Rudiawie Larasati. "PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Papua)", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2021 Publication	<1 %
21	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %

- 22 Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus <1%  
Student Paper
- 
- 23 Yustiana Djaelani, Subhan Subhan. "MODERASI KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN KINERJA MANAJERIAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT", Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 2019 <1%  
Publication
- 
- 24 Khaerunnisa Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019 <1%  
Publication
- 
- 25 Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang <1%  
Student Paper
- 

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words